



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG

# RENJA 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**Tahun 2025**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

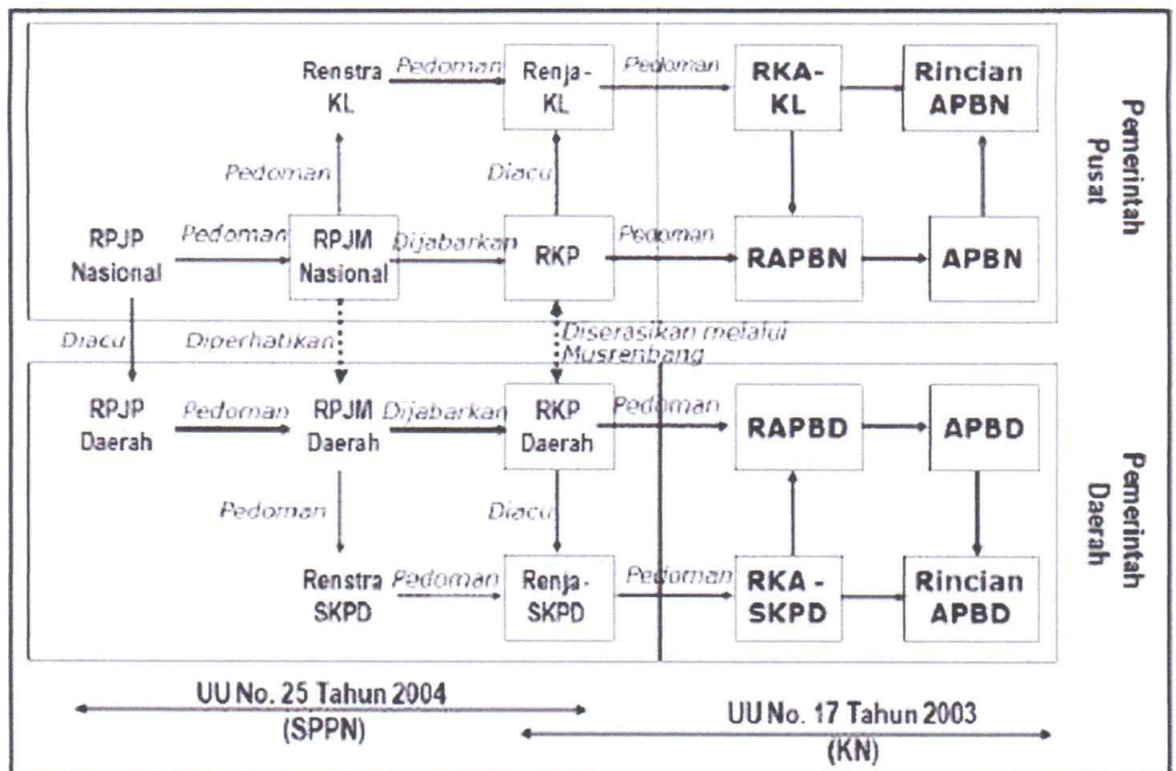
#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, setiap Perangkat Daerah dapat melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan seperti :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sejalan dengan ketentuan tersebut serta berdasar hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tana Tidung menyusun Perubahan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perubahan dilakukan secara simultan dengan RKPD Perubahan guna memastikan keselarasan serta integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 4);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2024);
- k. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 30);
- l. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 19);
- m. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Tahun 2025.

Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk menyesuaikan kondisi umum serta permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dengan situasi terkini. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai alat untuk menyelaraskan perencanaan kerangka pendanaan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia. Dengan demikian, Perubahan Renja ini menjadi dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.2. Landasan Hukum**

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN  
TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tana Tidung sampai  
dengan Triwulan II Tahun 2025

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tana Tidung Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk kajian terhadap kinerja dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah, termasuk program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi pelaksanaan, serta alokasi dan realisasi anggaran.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 bertujuan untuk mengidentifikasi capaian target indikator kinerja, tingkat penyerapan anggaran, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, evaluasi ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025. Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung

| Kode              | 1 | 2                                                                                                             | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                | Target dan Realisasi Tahun 2025 |                      |                             |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|
|                   |   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Kinerja               | Realisasi<br>Kinerja | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |
| 1                 |   |                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                               | 5                    | 6                           |
| 1                 |   | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                      |                             |
| 1 05              |   | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                      |                             |
| 1 05 03           |   | Program Penanggulangan Bencana                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                      |                             |
| 1 05 03           |   | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                      |                             |
| 1 05 03           |   | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 782 Orang                       | 0 Orang              |                             |
| 1 05 03 2.01 0004 |   | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                      |                             |
| 1 05 03 2.02 0015 |   | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                           | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya                                                                                             | 5 Unit                          | 0 Unit               |                             |

|   |    |    |      |      |                                                                             |                                                                                                                                                                  |            |            |  |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0008 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                        | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan                                                                                              | 782 Orang  | 0 Orang    |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota        | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya                                                                                         | 160 Orang  | 0 Orang    |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                    | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana                    | 4 Kawasan  | 0 Kawasan  |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0017 | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>                   |                                                                                                                                                                  |            |            |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat                   | 1 Dokumen  | 0 Dokumen  |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota           | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana                                                                       | 2 Orang    | 0 Orang    |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                              | 10 Orang   | 0 Orang    |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0009 | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                         |                                                                                                                                                                  |            |            |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0009 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                           | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten yang dillegalkan | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0011 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana            | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan                                                                                                                 | 1 Dokumen  | 0 Dokumen  |  |

|         |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                |                |  |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|
|         |      | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota                             | Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun             |                |                |  |
| 1 05 01 |      | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                    |                                                                                                                                                                        |                |                |  |
| 1 05 01 | 2.01 | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |                                                                                                                                                                        |                |                |  |
| 1 05 01 | 2.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen      | 2 Dokumen      |  |
| 1 05 01 | 2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 13 Laporan     | 4 Laporan      |  |
| 1 05 01 | 2.02 | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                                                                                                                                                                        |                |                |  |
| 1 05 01 | 2.02 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 25 Orang/bulan | 22 Orang/bulan |  |
| 1 05 01 | 2.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen     | 6 Dokumen      |  |
| 1 05 01 | 2.05 | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |                                                                                                                                                                        |                |                |  |
| 1 05 01 | 2.05 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 1 Orang        | 1 Orang        |  |
| 1 05 01 | 2.06 | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             |                                                                                                                                                                        |                |                |  |
| 1 05 01 | 2.06 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 4 Paket        | 3 Paket        |  |
| 1 05 01 | 2.06 | Penyediaan Barang Cetak dan                                                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan                                                                                                                                          | 3 Paket        | 0 Paket        |  |

|   |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |            |           |  |
|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0008 | Pengadaan                                                                                                           | Pengadaan yang Disediakan                                                                              |            |           |  |
|   |    |    |      |      | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                            | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                | 4 Laporan  | 0 Laporan |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan | 6 Laporan |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                           |                                                                                                        |            |           |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit     | 0 Unit    |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |                                                                                                        |            |           |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan | 6 Laporan |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan | 6 Laporan |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan | 6 Laporan |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                                                                                        |            |           |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit     | 2 Unit    |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit     | 8 Unit    |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 6 Unit     | 4 Unit    |  |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                        | Faktor Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 2                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 05              | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 05 03           | Program Penanggulangan Bencana                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 05 03           | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 05 03           | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dan kapasitas fasilitator atau petugas KIE masih terbatas</li> <li>- Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan masih rendah karena masih menganggap kegiatan bersifat seremonial</li> <li>- Koordinasi belum maksimal</li> </ul> |
| 1 05 03 2.01 0004 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 05 03 2.02 0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                           | Efisiensi Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 05 03 2.02 0008 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                          | Fasilitator dan instruktur yang memiliki kompetensi teknis dalam penyusunan skenario, pelaksanaan, dan evaluasi gladi masih terbatas.                                                                                                                                                         |
| 1 05 03 2.02 0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                                          | Efisiensi Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 05 03 2.02 0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                      | Efisiensi Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                   |                                                                                                                           |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 05 03 2.02 0017 | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>                                                                 |                                  |
| 1 05 03 2.03 0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                                               | Tidak Ada Kejadian               |
| 1 05 03 2.03 0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                         | Tidak Ada Kejadian               |
| 1 05 03 2.03 0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                               | Tidak Ada Kejadian               |
| 1 05 03 2.03 0009 | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                                                                       |                                  |
| 1 05 03 2.04 0009 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                                                         | Proses Lelang yang belum efektif |
| 1 05 03 2.04 0011 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | Administrasi                     |

- 2) Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                           | Faktor Pendukung                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                 | 2                                                                                                | 3                                                 |
| <b>1</b>          | <b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>                           |                                                   |
| 1 05              | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b> |                                                   |
| 1 05 01           | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                               |                                                   |
| 1 05 01 2.01      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                          |                                                   |
| 1 05 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  | - Dukungan Regulasi dan Pedoman Teknis yang Jelas |

|                   |                                                                                                                     |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                     | - Peran aktif OPD Pengampu                                                      |
| 1 05 01 2.01 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | - Dukungan Regulasi dan Pedoman Teknis yang Jelas<br>- Peran aktif OPD Pengampu |
| 1 05 01 2.02      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       |                                                                                 |
| 1 05 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | Merupakan Kegiatan Bersifat Administratif dan Rutin                             |
| 1 05 01 2.02 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                       | Merupakan Kegiatan Bersifat Administratif dan Rutin                             |
| 1 05 01 2.06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           |                                                                                 |
| 1 05 01 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Merupakan Kegiatan Bersifat Administratif dan Rutin                             |
| 1 05 01 2.06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | Merupakan Kegiatan Bersifat Administratif dan Rutin                             |
| 1 05 01 2.06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Merupakan Kegiatan Bersifat Administratif dan Rutin                             |
| 1 05 01 2.07      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                           |                                                                                 |
| 1 05 01 2.07 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Merupakan Kegiatan Bersifat Administratif dan Rutin                             |
| 1 05 01 2.08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |                                                                                 |
| 1 05 01 2.08 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Merupakan Kegiatan Bersifat Administratif dan Rutin                             |
| 1 05 01 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Merupakan Kegiatan Bersifat Administratif dan Rutin                             |
| 1 05 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Merupakan Kegiatan Bersifat Administratif dan Rutin                             |
| 1 05 01 2.09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                                                                 |
| 1 05 01 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Merupakan Kegiatan Bersifat Administratif dan Rutin                             |
| 1 05 01 2.09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Merupakan Kegiatan Bersifat Administratif dan Rutin                             |
| 1 05 01 2.09 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Merupakan Kegiatan Bersifat Administratif dan Rutin                             |

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3, maka kebijakan serta langkah-langkah perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada Perubahan Anggaran Tahun 2025 guna memastikan pencapaian seluruh kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan meliputi :

- 1) Penajaman prioritas kegiatan, dengan memfokuskan alokasi anggaran pada kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran kinerja utama perangkat daerah.
- 2) Realokasi dan refocusing anggaran, dari kegiatan yang kurang mendesak atau memiliki serapan rendah menuju kegiatan strategis yang mendukung target kinerja tahun berjalan.
- 3) Peningkatan efisiensi belanja, melalui optimalisasi penggunaan sumber daya, dan pengendalian biaya operasional
- 4) Penguatan koordinasi antar bidang dan antar pemangku kepentingan, untuk memastikan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program lintas sektor.
- 5) Percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas, terutama pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, penurunan risiko bencana, dan peningkatan ketahanan daerah.
- 6) Peningkatan kualitas perencanaan teknis dan administrasi anggaran, agar setiap perubahan anggaran didukung oleh data kinerja, capaian output, dan analisis kebutuhan yang akurat.
- 7) Monitoring dan evaluasi kinerja yang lebih intensif, melalui pelaporan berkala serta penyesuaian strategi pelaksanaan apabila ditemukan deviasi dari target yang telah ditetapkan.
- 8) Optimalisasi dukungan pembiayaan dari sumber lain, seperti Dana Alokasi Khusus, hibah, atau kemitraan dengan lembaga non-pemerintah dan sektor swasta untuk memperkuat capaian program.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Renja  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tana Tidung  
Tahun 2025

| <b>No</b> | <b>Tujuan</b>                                                                                                                                        | <b>Sasaran</b>                                                       | <b>Indikator Kinerja<br/>Sasaran</b> | <b>Target<br/>Tahun 2025</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1.        | Mewujudkan ketangguhan daerah terhadap bencana melalui penurunan risiko secara terencana dan berkelanjutan.<br>Indikator : IRB<br>Target : 142 Angka | Meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam menghadapi bencana. | Indeks Ketahanan Daerah (IKD)        | 0,61 angka                   |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rumusan perubahan program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2025 Perubahan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.











Tabel 4.2

## Rumusan Rencana Pemenuhan SPM Tana Tidung Tahun 2025 (Perubahan)

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021                    |                                                                                           |        |                     | Rencana Pemenuhan Tahun 2026                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                     |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|
| Jenis Pelayanan Dasar                                   | Indikator                                                                                 | Target | Batas Waktu Capaian | Dukungan Sub kegiatan                                                                            | Indikator                                                                                                                                                                                                                                       | Target    | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| Pelayanan informasi rawan bencana                       | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | 100%   | Setiap tahun        | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab./Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kab./Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 782 Orang | 25,403,500.00       | BPBD             |
| Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100%   | Setiap tahun        | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab./Kota                                              | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab./Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan                                                                                                                         | 782 Orang | 13,380,000.00       | BPBD             |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |            |                |      |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|
|  |  |  |  |  |  | mitigasi bencana                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |            |                |      |
|  |  |  |  |  |  | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                          | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kab./Kota | 782 Orang  | 32,302,965.00  | BPBD |
|  |  |  |  |  |  | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab./Kota | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya                        | 12 Laporan | 64,569,221.00  | BPBD |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                          | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas                                                                                                                     | 1 Unit     | 707,113,352.00 | BPBD |

|                                                    |                                                                                      |      |              |                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                  |      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
|                                                    |                                                                                      |      |              |                                                              |                                                                                                                                                |           | sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya |      |  |  |  |  |
| Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% | Setiap Tahun | Respon Cepat Darurat Bencana Kab./Kota                       | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 1 Dokumen | 7,020,000.00                                                     | BPBD |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                      |      |              | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab./Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana                                                     | 2 Orang   | 1,060,000.00                                                     | BPBD |  |  |  |  |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dalam satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan dinamika pelaksanaan program, hasil evaluasi kinerja, serta perkembangan kondisi daerah yang memerlukan penyesuaian kebijakan dan anggaran.

Renja Perubahan Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan BPBD Tahun 2025, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian target dan strategi pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan kondisi aktual, kapasitas keuangan daerah, serta prioritas pembangunan daerah.

Melalui dokumen Renja Perubahan ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan BPBD Kabupaten Tana Tidung dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan adaptif, guna mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra BPBD Tahun 2021–2026, khususnya dalam meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi, merespons, dan memulihkan diri dari bencana secara berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini, diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh bidang di lingkungan BPBD Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta menjadi instrumen untuk memastikan setiap langkah perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran mendukung terwujudnya ketahanan daerah terhadap bencana.

Kepala Pelaksana,

**DIDIK DARMADI, S.T.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 198112182006041012



**Pemerintah Kabupaten Tana Tidung**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**